



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Kel Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99332
www.ptun-jayapura.go.id, kesekretariatan@ptun-jayapura.go.id, kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id

Jayapura, 13 Januari 2025

Nomor : 79/SEK.01/OT1.2/I/2025

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Laporan Bulanan Desember 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

MANADO

Dengan Hormat,

Bersama Ini Kami Kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bulan
Desember Tahun 2024

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA
MERNALCINTHIA, S.H., M.H.

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN DESEMBER TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	16
1. Struktur Organisasi.	16
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	17
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	47

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 14.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 16.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 20.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 22.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 23.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 24.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 25.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 26.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 27.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 28.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Desember secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – 2024
15	MERNA CINTHIA, S.H.,M.H	Periode 2024 – Sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

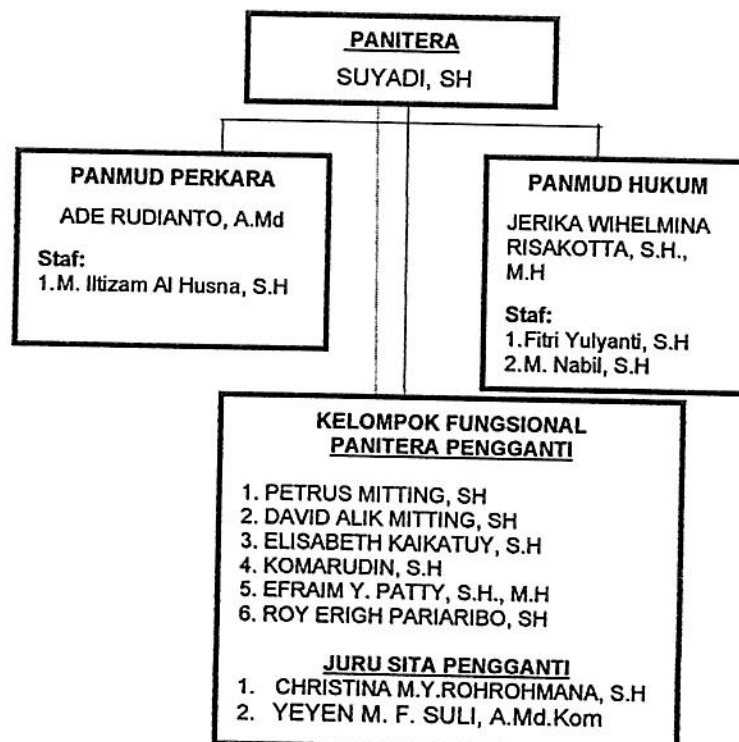
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. **Kepaniteraan Muda Perkara;** Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Desember Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	11	4	2	13	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	8	-	8
2	Kepegawaian	1	-	1
3	Perijinan	-	2	2
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	2	2	4
Total		11	4	15

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28,510,000	-	-	28,510,000
2	Penerimaan	-	6,267,500	-	6,267,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	500,000	500,000
4	Biaya Panggilan	-	-	360,000	360,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	139,000	139,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	510,000	510,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	250,000	250,000
9	Materai	-	-	20,000	20,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	170,000	170,000
	b. Redaksi	-	-	20,000	20,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	971,000	971,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	2,151,500	2,151,500
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28,510,000	6,267,500	5,092,000	29,685,500

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Desember Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,911,500	-	-	7,911,500
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7,911,500	500,000	-	8,411,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,175,000	-	-	1,175,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	-	-
5	Materai	-	-	-	-
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	-	-
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,175,000	-	-	1,175,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024 adalah 67,44%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Desember Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan. Untuk Bulan Desember 2024 tidak ada register di Meja Informasi.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Agustus Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	K.H.T	11-12-2024	Salinan Perkara No. 22/G/2024/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
2	Prinsipal (Penggugat)	13-12-2024	Salinan Putusan Perkara No. 05/G/2010/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
3	K.H.T Intervensi	17-12-2024	Salinan Putusan Perkara No. 27/G/2019/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan Dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Desember 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 13. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Frangky Wally	Konsultasi Hukum Terkait SK Gubernur	1 Jam	-
2	Dina Toto	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	
3	Menase Bouway	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
4	Mience Ohe	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
5	Siska Felentina yoku	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
6	Elisa Stepanus Banundi	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
7	Hilter Septinus Puraro	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
8	Daniel Warweri	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
9	Linda Suryani Ibo	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
10	Fred Frika Toto	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
11	Dorince Sokoy	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
12	Permenas Yoku	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
13	Delia Rode Yoku	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
14	Patricia Sicil Ya Yoku	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-
15	Lidia Maria Mokay	Konsultasi Hukum Terkait Kecurangan DPRK	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip

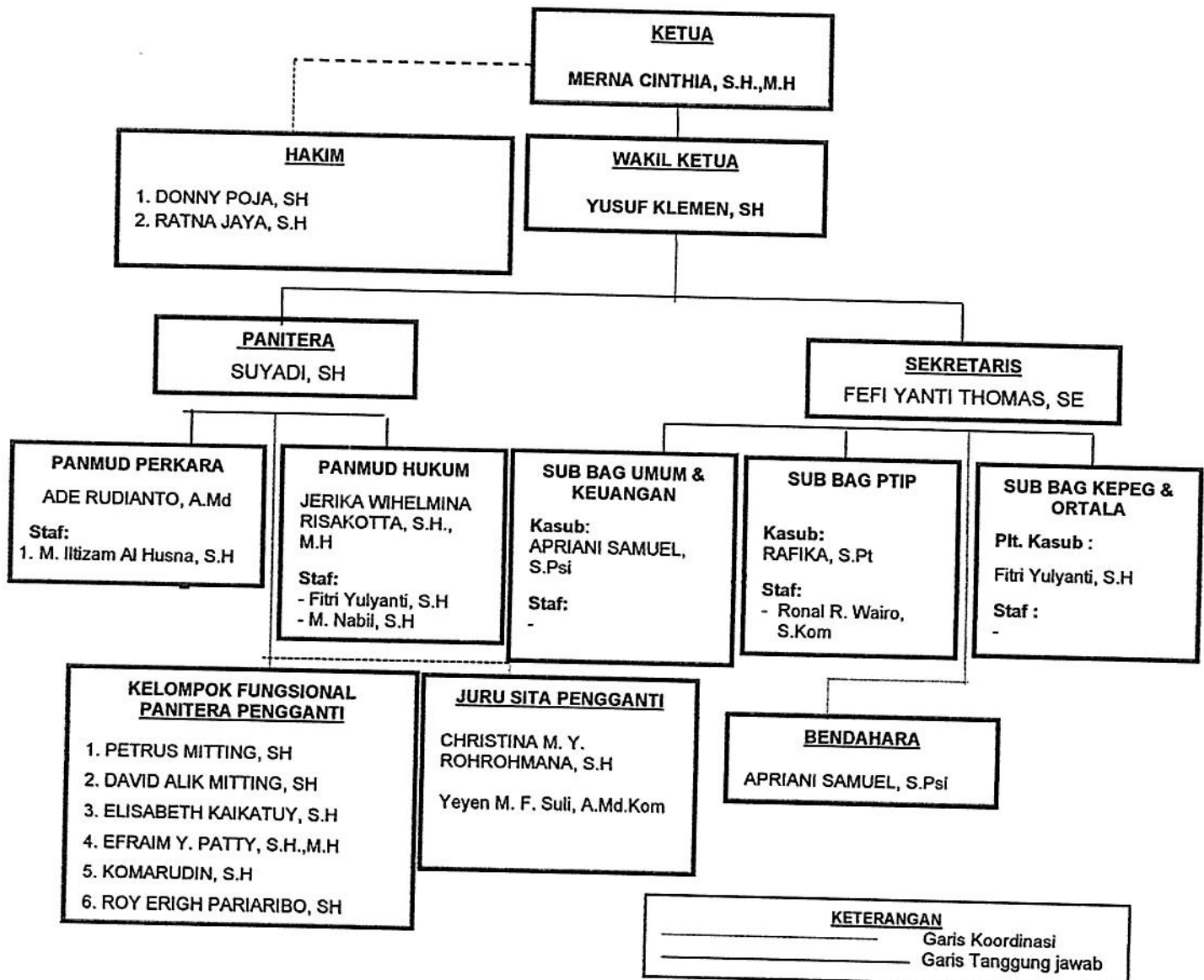
perkara dalam jumlah banyak. Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Tabel 14. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,805,122,000
Belanja Barang	1,901,332,000
Total	5,706,454,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Desember Tahun 2024

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

a. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,797,872,000	248,575,163	3,714,459,106	83,412,894
2	Barang	1,901,332,000	165,715,150	1,888,269,607	13,062,393
3	Barang Non Operasional	7,250,000	-	7,250,000	-

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,680,000	4,800,000	149,603,240	1,076,760
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

b. Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Desember Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,536,949	28,183,781
2	425232	Uang Meja (Leges)	210,000	2,090,000
3	425233	Ongkos Perkara	220,000	2,560,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	854,000	8,964,000
		Total		41,797,781

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2, halaman gedung 2000 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 19. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m2	200 m2
2	B	1993		150 m2
3	C	1992	1100 m2	70 m2
4	C	1992		70 m2
5	C	1992		70 m2
6	C	1992		70 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	-	-
2	B	700 M2	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Ketua
3	C	1100 M2	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

**Tabel 21. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	YUSUF KLEMEN, SH	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 22. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Proyektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan telah ada penetapan dari KPKNL Jayapura. Sementara penghapusan yang telah berjalan menunggu surat keputusan BUA MARI untuk selanjutnya

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 23. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Desember Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	4	56
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	21	57
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	7	6
4	Kepaniteraan Perkara.	7	27
5	Kepaniteraan Hukum.	1	12

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan November 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 23 Orang yang terdiri dari:

Tabel 24. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
2.	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	
3.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
4.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
5.	Panitera	Suyadi, S.H	
6.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
7.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
8.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
9.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
10.	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
17.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
18.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
19.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
20.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
21.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
22.	Analisis Tata Laksana	Indra Febrian, S.H	
23.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
24.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/c
2	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	IV/b
3	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
4	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
5	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
6	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
7	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
8	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
9	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
17	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
18	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
20	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
21	Analisis Tata Laksana	Indra Febrian, S.H	III/b
22	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
24	CPNS	M. Nabil, S.H	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 26. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tabel 27. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Desember mengikuti Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait.

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
2	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
3	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
4	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
5	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
6	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
7	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
8	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
9	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
10	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
11	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
17	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
18	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-

19	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
20	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
21	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
22	M. Iltizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
23	M. Nabil, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Desember Tahun 2024 dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 kewenangan Eselon 1 dan revisi kewenangan kanwil DJPb. Revisi DIPA 05 Dirjen Badilmiltun dilakukan revisi kewenangan kanwil DJPb.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 300 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 200 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP, 50 Mbps untuk ruang sidang online dan 50 Mbps untuk ruang media center.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang untuk kesekretariatan, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 13 Januari 2025


MERNA CINTHIA S.H.,M.H

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI –

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539133)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005 01.2 539133/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005 01.2 539133/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 15 MARET 2024, SP DIPA- 005 01.2 539133/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPA- 005 01.2 539133/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPA- 005 01.2 539133/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 15 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	85,324%	7	85,774%	105,974%	105,974%	115,643%	125,1174%	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	6986	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	6986.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	6986.EBA.362	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan										
	A. 521210	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 250.000)	7.250.000		100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	7.250.000	7.250.000	100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
	6986.EBA.394	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.324.030.000	1.233.144.820	93.13%	90.632.120	6.87%	1.324.070.940	100.00%	3.050	0.00%	
	511110	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	15.915	69.20%	699	4.30%	16.903	73.49%	6.097	26.51%	
	511121	Belanja Tunj. Suamitsteri PNS	60.594.000	84.080.890	92.84%	8.439.550	7.11%	90.520.440	99.65%	43.550	0.05%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32.004.000	29.618.048	92.54%	2.375.254	7.42%	31.993.302	99.97%	10.698	0.03%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	30.420.000	92.89%	2.340.000	7.14%	32.760.000	100.00%	0	0.00%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.440.492.000	1.276.840.000	88.65%	100.610.000	6.98%	1.380.450.000	95.83%	60.042.000	4.17%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	254.756.000	253.534.270	99.52%	1.168.951	0.47%	254.733.221	99.99%	25.778	0.01%	
	511126	Belanja Tunj. Bersas PNS	67.000.000	61.557.000	91.85%	4.707.300	7.03%	66.264.300	98.90%	735.700	1.10%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	187.310.000	187.613.000	99.48%	14.321.000	7.91%	182.434.000	97.40%	4.876.000	2.60%	
	511135	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	168.000.000	182.395.000	92.12%	14.805.000	7.48%	197.200.000	99.60%	800.000	0.40%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12.480.000	11.665.000	93.47%	745.000	5.97%	12.410.000	99.44%	70.000	0.56%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	158.400.000	132.000.000	83.33%	6.600.000	6.08%	141.600.000	89.39%	16.800.000	10.61%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3.797.872.000	3.455.883.943	91.26%	248.575.163	6.55%	3.714.459.106	97.80%	83.412.894	2.20%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	587.027.000	498.395.778	84.90%	87.163.000	14.85%	585.558.778	99.75%	1.469.222	0.25%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.100.000	70.680.485	96.69%	2.005.700	2.74%	72.686.185	99.43%	413.805	0.57%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	218.250.000	204.074.106	93.50%	13.927.170	6.38%	218.001.276	99.89%	248.721	0.11%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.360.000	8.450.100	90.11%	2.281.080	24.37%	8.731.180	93.28%	628.820	6.72%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	4.320.000	3.964.707	91.78%	348.738	8.10%	4.314.445	99.87%	5.555	0.13%	
	522113	Belanja Langganan Air	624.000	560.000	89.74%	56.000	8.97%	616.000	98.72%	8.000	1.28%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5.300.000	5.239.200	98.85%	0.000	0.00%	5.239.200	98.85%	60.800	1.15%	



NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
1	2	3	4	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	13
	C 5231111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	506.916.000	506.843.503	99,85%	125.000	0,02%	506.768.503	99,87%	147.497	0,03%	
	5231116	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58.713.000	58.700.000	99,98%		0,00%	58.700.000	99,98%	13.000	0,02%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.540.000	184.797.365	83,04%	30.642.022	13,90%	215.739.407	96,94%	6.600.593	3,06%	
	D 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152.000	34.000.000	99,55%		0,00%	34.000.000	99,55%	152.000	0,45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58.712.000	41.206.000	72,60%	13.662.000	24,09%	54.868.000	96,75%	1.844.000	3,25%	
	H 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.548.000	106.103.180	86,50%	15.173.440	12,18%	123.276.620	99,68%	1.271.380	1,02%	
	I 524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.770.000	0	0,00%	1.770.000	100,00%	1.770.000	100,00%	0	0,00%	
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBA.962	1.901.332.000	1.720.784.457	90,50%	167.485.150	8,81%	1.888.269.607	99,31%	13.062.392	0,69%	
		JUMLAH KESELURUHAN	5.706.454.000	5.193.918.400	91,02%	416.060.313	7,29%	5.609.978.713	98,31%	96.475.287	1,69%	

Jumlah Anggaran	5.706.454.000	Percentase
Realisasi Anggaran	5.609.978.713	98,31%
Sisa Anggaran	96.475.287	1,69%

Jayapura, 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



PERYANTI THOMAS, SE.
NIP. 19750310 200604 2 002

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2024

SATKER/ KODE SATKER
PROFINSI
BAGIAN ANGGARAN
UNIT ORGANISASI
NO. DIPA/ TGL DIPA
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI

: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
: PAPUA (2500)
: MAHKAMAH AGUNG (005)
: DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
: SP DIPA- 005.05 2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
: SP DIPA- 005.01 2.539139/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPA- 005.01 2.539139/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01 2.539139/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPA- 005.01 2.539139/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
I	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	4	5	62.50%	7	88.12%	95 (57.1)	100 (50%)	115 (403)	12.2 (1.74%)	13
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20.500.000	20.500.000	100.00%		0.00%	20.500.000	100.00%	0	0.00%	
	JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA			20.500.000	100.00%	0	0.00%	20.500.000	100.00%	0	0.00%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.000	9.000	2.50%		0.00%	9.000	2.50%	351.000	87.50%	
	A. 521211	- Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Pengiriman Berkas Perkara	150.000	120.000	80.00%		0.00%	120.000	80.00%	30.000	20.00%	

+

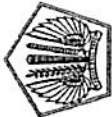
NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah Kegiatan 1059.BCA												
III	1055.0BA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	510.000	129.000	25,28%	0	0,00%	129.000	25,28%	381.000	74,71%	
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	4.200.000	100,00%		0,00%	4.200.000	100,00%	0	0,00%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultan Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 Bln)	28.800.000	24.000.000	83,33%	4.800.000	16,67%	28.800.000	100,00%	0	0,00%	
Jumlah Kegiatan 1059.QBA												
IV	1055.0CA.002	Parkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	28.200.000	85,45%	4.800.000	14,55%	33.000.000	100,00%	0	0,00%	
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522101	- Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	300.000	300.000	100,00%		0,00%	300.000	100,00%	0	0,00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 2 Keg)	37.007.000	36.312.000	98,12%		0,00%	36.312.000	98,12%	695.000	1,88%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	7.200.000	7.200.000	100,00%		0,00%	7.200.000	100,00%	0	0,00%	
		- Penginapan (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	25.823.000	25.822.240	100,00%		0,00%	25.822.240	100,00%	760	0,00%	
		- Uang Harian (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	28.340.000	28.340.000	100,00%		0,00%	28.340.000	100,00%	0	0,00%	
Jumlah Keseluruhan												
			96.670.000	95.974.240	99,28%	0	0,00%	95.974.240	99,28%	695.760	0,72%	
Jumlah Keseluruhan												
			150.680.000	144.803.240	96,10%	4.800.000	3,19%	149.603.240	99,29%	1.076.760	0,71%	

Jumlah Anggaran	150.680.000	Percentage
Realisasi Anggaran	149.603.240	99,29%
Sisa Anggaran	1.076.760	0,71%

Jayapura, 02 Januari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

FERTYANTI THOMAS, SE
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01



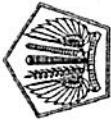
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REKAP PNBK KEMENTERIAN

Bulan : Desember

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	210,000
2	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	220,000
3	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425239	Pendapatan Kelaksaan dan Peradilan Lainnya	854,000
GRAND TOTAL									1,284,000

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05



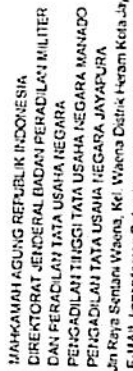
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN	BI					
			Pajak	Non Pajak				
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,536,949	0	1,536,949
GRAND TOTAL		0	0	0	0	1,536,949	0	1,536,949

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



FORMULARI-11

Jayapura, 31 Desember 2024

WAKIL KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SYNOPSIS

LAPORAN JENIS PERKARA
 BULAN DESEMBER TAHUN 2024

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	PERKARA			PENGUGAT		TERGUGAT		DISMISSAL		PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN IN			Permohonan			Terima Berkas			KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Jayapura, 31 Desember 2024

Mengetahui :
 WAKIL KETUA,
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

YUSUF KLEMEN



Formulir LI - T3

[illegible]

WAKIL KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

YUSUF KLEMEN

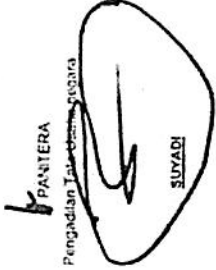
SUYADI

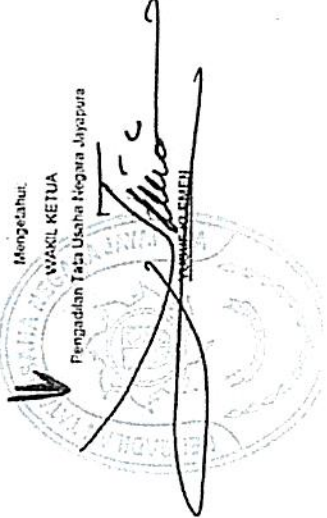
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN DESEMBER 2024

Formulir U - 14

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	JASA	PEMBERI JASA	BANTUAN	BANTUAN	KETERANGAN
1	-	02-12-2024	Franky Wally	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082199812366, Jln Raya Abu Pantai Engros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum terkait SK Gubernur	
2	-	03-12-2024	Dina Tolo		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
3	-	04-12-2024	Mamas Bouway		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
4	-	05-12-2024	Mlenco Oha		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
5	-	06-12-2024	Siska Felentina Yoku		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
6	-	09-12-2024	Elisa Stepanus Banundi		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
7	-	10-12-2024	Hitor Suplinus Purito		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
8	-	11-12-2024	Daniel Warwail		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
9	-	12-12-2024	Linda Suryani Ibo		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
10	-	13-12-2024	Fried Filika Tolo		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
11	-	17-12-2024	Dorineo Sakay		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
12	-	18-12-2024	Permenas Yoku		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
13	-	19-12-2024	Della Rode Yoku		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
14	-	27-12-2024	Patricia Sicil Ya Yoku		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	
15	-	30-12-2024	Lidia Maria Mokay		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait kecuranagn DPRK	

Jayapura, 31 Desember 2024

PANTERA
 Pengadlan Tata Usaha Negara

 SUYADI

Mengesahut
 WAKIL KETUA
 Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln.Raya Sentani Waena, Kel. Waena Distrik Heram Kota Jayapura Telp.(0967)574160
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id Situs www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No.		NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
			N I H I L			

Formulir L1-T5

Jayapura, 31 Desember 2024

Mengetahui :

WAKIL KETUA,
Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

YUSUF KLEMEN

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUTARDI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln Raya Sentani Waena, Kel. Waena Distrik Hiram Kota Jayapura Telp (0967)574160
E-MAIL: kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id Situs: www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	28.510.000	-	-	28.510.000
2	Penerimaan	-	6.267.500	-	6.267.500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	500.000	500.000
4	Biaya Panggilan	-	-	360.000	360.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	139.000	139.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	510.000	510.000
8	Biaya Pengiriman	-	-	250.000	250.000
9	Materai	-	-	20.000	20.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	170.000	170.000
	b. Redaksi	-	-	20.000	20.000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	971.500	971.500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	2.151.500	2.151.500
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	28.510.000	6.267.500	5.092.000	29.685.500

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

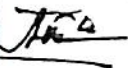
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7.911.500	-	-	7.911.500
2	Penerimaan	-	500.000	-	500.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7.911.500	500.000	-	8.411.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1.175.000	-	-	1.175.000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	-	-
5	Materai	-	-	-	-
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	-	-
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1.175.000	-	-	1.175.000

Jayapura, 31 Desember 2024

MENGETAHUI :
WAKIL KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura


YUSUF KLEMEN

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura


SUYADI



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

RPL 063 PDT PTUN JAYAPURA UTK BIAYA PERK

JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001,Rt.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan
Statement Date : 31/12/24

Periode Transaksi
Transaction Period : 01/12/24 - 31/12/24

No. Rekening
Account No : 214201000003307

Unit Kerja
Business Unit : KCP WAENA

Nama Produk
Product Name : Giro Tres.NolP

Alamat Unit Kerja
Business Unit Address : WAENA
JAYAPURA

Valuta
Currency : IDR

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
02/12/24 13:03:29	190454932412000024000000003507XATM XTRFL TRF BERSAMA FROM AGUSTINUS JENAMI LA 214201000003307ATM 5104814600457108	0668173	0.00	665,000.00	23,680,400.00
02/12/24 18:09:10	BFST214201000003307SAJUL RAHMA BMRJIDJA 20241203BMRJIDJA01000229176915 ESB.BFST.00038N.20241203FASTIDJA01095117266	6666660	0.00	21,000.00	23,701,400.00
06/12/24 16:59:50	BRVA19045493241200006 ELVIS KRI:CEVAIDJA 20241206CEVAIDJA01000292052752 ESB.BFST.00038N.2024120671032911	6666647	0.00	665,000.00	24,366,400.00
06/12/24 17:04:56	BRVA19045493241200004 ELVIS KRI:CEVAIDJA 20241206CEVAIDJA01000292081907 ESB.BFST.00038N.2024120671785623	6666692	0.00	665,000.00	25,031,400.00
07/12/24 14:33:46	BRVA19045493241200006 LEUNES FI:BMRJIDJA 20241207BMRJIDJA0100022946409 ESB.BFST.00038N.2024120764249152	6666630	0.00	15,000.00	25,046,400.00
12/12/24 14:11:05	BRVA19045493241200006 MCHAMMAD :BMRJIDJA 20241212BMRJIDJA01000229389663 ESB.BFST.00038N.2024121242190248	6666637	0.00	16,500.00	25,062,900.00
13/12/24 13:44:35	ATMLTSFRM 00005891019045493241200009 TRF PRIMA FROM	0668171	0.00	603,000.00	26,265,900.00
15/12/24 02:44:59	BRVA19045493241200010BNBPEMERINTAH PR BRVA 19045493241200010BNBPEMERINTAH PR ESB.BNB.0200200P.774572059767	6668110	0.00	15,000.00	26,280,900.00
15/12/24 09:51:47	BRVA19045493241200012BNBPEJABAT PJ GU BRVA 19045493241200012BNBPEJABAT PJ G ESB.BNB.0200200P.775336850204	6666065	0.00	16,500.00	26,297,400.00
17/12/24 09:09:58	19045493241200013#000000237887XATM XTRFL TRF BERSAMA FROM JUSUF S TIMISELA LA 214201000003307ATM 5260512054523634	0668932	0.00	1,465,000.00	27,762,400.00
17/12/24 17:37:52	BRVA19045493241200015BNBKADRIAN CHRISBE BRVA 19045493241200015BNBKADRIAN CHRISBE ESB.BNB.0000200P.512153032603	0668921	0.00	41,000.00	27,803,400.00

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
17/12/24 18:15:13	ATM LTRPRM 00045032019045493241200016 TRF PRIMA FROM	0888185	0,00	41,000.00	27,844,400.00
17/12/24 19:27:26	ATM LTRPRM 00066644719945493241200017 TRF PRIMA FROM	0888212	0,00	41,000.00	27,885,400.00
18/12/24 10:30:12	ATM LTRPRM 00055336619945493241200018 TRF PRIMA FROM	0888169	0,00	41,000.00	27,926,400.00
18/12/24 17:52:35	ATM LTRPRM 00003742619945493241200019 TRF PRIMA FROM	0888049	0,00	943,000.00	28,869,400.00
18/12/24 20:50:00	BFST 14201000003307DEVIA BELL BNINIDIA 20241218BNINIDIA01000224814152 ESB BFST.0008N.20241218FASTIDIA01050041933	8888682	0,00	51,000.00	28,920,400.00
19/12/24 08:00:41	NEMB MERZENDA SOUNO TO RPL 063 POT PTUN ESB NEMB.0001500F.776663066662	8888542	0,00	18,500.00	28,938,900.00
19/12/24 08:06:34	WBNASTOR491101030060538T0214201000003307 ESB WBNK.0303A00F.512196906812	0888790	0,00	46,000.00	28,984,900.00
19/12/24 17:32:12	BFST 14201000003307DEVIA PUTU TE.CENWIDIA 20241219CENWIDIA01000255765778 ESB BFST.0008N.20241219FASTIDIA01056077620	8888624	0,00	16,000.00	29,000,900.00
19/12/24 18:43:42	ATM LTRPRM 00042458519945493241200021 TRF PRIMA FROM	0888622	0,00	13,000.00	29,013,900.00
20/12/24 12:26:55	BFST 14201000003307YOHANES STIV SSPIDIA 20241220SSPIDIA01000295906442 ESB BFST.0008N.20241220FASTIDIA0105002755	8888685	0,00	20,500.00	29,034,400.00
20/12/24 12:37:30	BFVA19945493241200022 LEUNES FL.BK/RIIDIA 20241220BNINIDIA01000222828708 ESB BFST.0008N.2024122062198725	8888685	0,00	15,000.00	29,049,400.00
20/12/24 21:07:04	NEMB YUSUF IRJANTO TO RPL 063 POT PTUN ESB NEMB.0001500F.777463518998	8888579	0,00	33,500.00	29,082,900.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
22,815,400.00	0.00	6,267,500.00	29,082,900.00

Terbilang / In Words

DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH
TWENTY NINE MILLION EIGHTY TWO THOUSAND NINE HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any difference from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank POB Finance Unit

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN DESEMBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
III	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	4.200.000	100,00%	0	0,00%	4.200.000	100,00%	0	0,00%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bln)	28.800.000	24.000.000	83,33%	4.800.000	16,67%	28.800.000	100,00%	0	0,00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33.000.000	28.200.000	85,45%	4.800.000	14,55%	33.000.000	100,00%	0	0,00%	

Jumlah Anggaran	33.000.000	Percentage
Realisasi Anggaran	33.000.000	100,00%
Sisa Anggaran	-	0,00%

Jayapura, 31 Desember 2024
Korutasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



FEB YANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200604 2 002